

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perkumpulan atau organisasi dan pemerintah mempunyai visi yang menjadi tujuan organisasi tersebut didirikan. Visi tersebut dapat dicapai dengan berbagai misi, sehingga diperlukan kinerja yang baik bagi suatu organisasi untuk mencapai visi tersebut. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson and Ivancevich: 1994). Dengan analisis kinerja suatu program dapat dinilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan, dan menilai seberapa baik pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Berbagai institusi dan organisasi menggunakan kinerja sebagai alat pengawas dengan menggunakan indikator yang sesuai yang penilaiannya juga dipakai untuk memperbaiki manajemen suatu organisasi (Government of Alberta, 2007). Pemerintah menjadi salah satu organisasi yang banyak memunculkan berbagai program yang digunakan sebagai cara untuk mencapai visi organisasi.

Pemerintah yang menjadi sektor publik mempunyai tugas untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat juga memiliki tugas yang perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121). Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Salah satu unit kerja pemerintah yang penting untuk di kaji anggarannya adalah sektor pertanian.

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting bagi kemajuan negara Indonesia. Sangat penting dan menjadi prioritas bagi pemerintah

untuk terus membuat kebijakan dalam rangka pencapaian visi pertanian yang berkelanjutan. Menurut Apriantono (2005) bahwa pembangunan pertanian Indonesia dihadapkan delapan tantangan yang paling mendesak untuk segera ditangani. Pertama, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian. Kedua, peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri. Ketiga, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Keempat, operasionalisasi pembangunan berkelanjutan. Kelima, globalisasi perdagangan dan investasi. Keenam, terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa. Ketujuh, sinkronisasi program pusat dan daerah sejalan era otonomi daerah. Dan kedelapan, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dalam jangka panjang, sasaran yang perlu ditempuh adalah, terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing, mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian dan hapusnya masyarakat petani miskin serta meningkatnya pendapatan petani.

Tantangan kedua yang disebutkan oleh Aprianto (2007) merupakan salah satu tugas dari Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Padi yang menjadi komoditas yang salah satu komoditas pangan yang diproduksi oleh hampir dua puluh satu juta keluarga petani masih belum dapat menjadikan Indonesia swasembada pangan (BPS, 2013). Beberapa petani yang memproduksi padi terkadang mengalami kesulitan pangan, disaat musim palawija atau musim paceklik padi. Berbagai program telah dicanangkan oleh Badan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Beberapa program diantaranya adalah Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2017).

Objek dari seluruh program dari Badan Ketahanan Pangan adalah masyarakat petani yang berperan sebagai produser. Agar program dapat terlaksana dengan baik

kerjasama antara petani dan pemerintah harus terlaksana dengan baik. Masyarakat petani yang memiliki kesamaan tujuan dan budaya disuatu tempat menjadi suatu perkumpulan yang kemudian disebut kelompok tani. Kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani atau yang biasa disebut Gapoktan, agar dapat menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Gapoktan menjadi sasaran utama bagi pemerintah seperti Badan Ketahanan Pangan untuk menjalankan program yang muncul dari kesamaan visi antara Pemerintah dan Gapoktan.

Gapoktan berfungsi sebagai eksekutor dari program – program pemerintah untuk mengembangkan masyarakat petani yang tergabung. Salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di tingkat petani adalah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Tujuan dari program LDPM ini adalah untuk meningkatkan nilai jual komoditas pangan yang di produksi oleh petani dan memberikan perlindungan kekurangan pangan disaat paceklik dengan memberikan pinjaman beras yang di akses melalui Gapoktan. Agar dapat program LDPM terlaksana dengan baik oleh Gapoktan, perlu pengawasan dan pembinaan dengan komunikasi yang baik antara Gapoktan dan penyuluh. Sehingga kinerja Gapoktan perlu pengawasan dan evaluasi agar tercipta kemandirian pangan di Gapoktan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, poktan, dan/atau gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan/atau jagung di saat panen raya serta masalah aksesibilitas pangan terus diupayakan oleh instansi terkait. Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2009 telah melaksanakan program bantuan sosial Penguatan - Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). Melalui kegiatan P-LDPM, pemerintah menyalurkan dan bantuan sosial (Bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada gapoktan dalam rangka memberdayakan kelembagaan tersebut (Kementerian Pertanian, 2013). Dana bantuan yang disalurkan kepada Gapoktan berupa hibah sehingga Gapoktan tidak perlu mengembalikan dana tersebut ke pemerintah. Gapoktan penerima program LDPM

wajib melakukan pembangunan sarana penyimpanan, melakukan aktivitas pembelian minimal sesuai HPP untuk gabah atau beras dan HRD (Harga Referensi Daerah) untuk jagung serta menyediakan cadangan pangan bagi anggota Gapoktan dengan menggunakan dana bantuan sosial yang diterima. Pelaporan aktivitas meliputi pembelian, penjualan dan cadangan pangan komoditas padi, beras atau jagung.

Kecamatan Tanggul merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Jember yang menjadi penerima bantuan sosial LDPM. Kecamatan Tanggul memiliki jumlah delapan desa yaitu Kramat Sukoharjo, Klatakan, Manggisan, Tanggul Wetan, Selodakon, Patemon, Tanggul Kulon. Namun dari kedelapan desa ini, hanya desa Selodakon saja yang lolos seleksi dari persyaratan yang diberikan oleh dinas ketahanan pangan untuk menerima bantuan dana sosial program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Kriteria Gapoktan yang lolos seleksi adalah memiliki kepengurusan Gapoktan (Ketua, Bendahara, Sekertaris, dan administer unit usaha), tidak mendapatkan modal pengutan dari, memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian atau modal, memiliki RMU, pengeringan, pembersihan, pengepakan, memiliki SDM yang berpengalaman, dan memiliki gudang sendiri dari hasil hibah atau bantuan pemerintah sebelumnya.

Tujuan program LDPM adalah agar Gapoktan mampu membeli hasil panen petani dengan harga setara HPP, sehingga petani memperoleh harga yang layak daripada menjual kepada tengkulak yang biasanya harga yang ditawarkan lebih rendah terutama disaat musim panen. Sebagai salah program yang mendukung ketahanan pangan dan juga mendukung kemandirian petani dalam mengelola sendiri hasil pertaniannya program perlu dilakukan evaluasi, sehingga dalam pelaksanaan program sudah mencapai tujuan. Terdapat 4 pokok indikator dalam menilai apakah Gapoktan sudah melaksanakan program LDPM dengan baik. Indikator penilaian tersebut adalah Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*)(Badan Ketahanan Pangan, 2016). Dalam pelaksanaan program evaluasi kinerja perlu di analisis sehingga tujuan dari program LDPM dapat dicapai. Penelitian ini sangat penting dilakukan agar Gapoktan sebagai pelaksana dapat mengetahui

kekurangan dari kinerjanya dan juga menjadi gepok tular kepada Gapoktan lain yang belum melaksanakan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

Evaluasi pada tahap penumbuhan bertujuan untuk mengetahui apakah Gapoktan sudah siap dalam pengembangan untuk menjadi tahap pengembangan sehingga layak untuk diberikan tambahan modal atau tambahan dana sesuai dengan kebijakan Badan Ketahanan Pangan dalam perencanaannya. Anggota Gapoktan yang telah melalui tahap penumbuhan dan memenuhi persyaratan, dapat diberikan pendampingan dan dana bansos tahap kedua ini. Dana bansos sebesar Rp 50.000.000,00 merupakan modal tambahan untuk pengembangan usaha pada unit usaha distribusipemasaran/pengolahan dan penambahan cadangan pangan pada unit pengelola cadangan.

1. Bagaimana pelaksanaan unit usaha dan program LDPM pada Gapoktan Mutiara Tani di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
2. Bagaimana Kinerja Gapoktan dalam melaksanakan program LDPM pada Gapoktan Mutiara Tani di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program LDPM pada Gapoktan Mutiara Tani di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
2. Mengevaluasi Kinerja Gapoktan dalam melaksanakan program LDPM pada Gapoktan Mutiara Tani di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan beberapa kegunaan bagi masyarakat. antara lain adalah sebagai berikut:

1. Petani, sebagai salah satu solusi dari permasalahan petani dalam menjual hasil produksi pertaniannya dan menaikkan posisi tawar menawar petani.
2. Pemerintah, sebagai rekomendasi dalam penetapan kebijakan dan membantu petani dalam mengelola hasil pertaniannya.

3. Pembaca, agar menjadi rekomendasi dan acuan untuk pembaca dalam melakukan penelitian terkait Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).